

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi yang berbentuk lahan bagi masyarakat terutama petani. Hubungan bangsa Indonesia dengan lahan yang merupakan kekayaan nasional yang sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan negara Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, hubungan manusia/masyarakat dengan lahan merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, ketidakadilan, sengketa dan konflik yang berkepanjangan yang dapat bersifat struktural. Lahan dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena lahan merupakan salah satu indikator dari kemiskinan.

Menurut BPS (2009), jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 39,05 juta jiwa (17,75%), yang sebagian besar tersebar di pedesaan. Penduduk miskin ini sekitar 90% adalah pekerja. Penduduk miskin ini paling banyak terdapat di sektor pertanian (56,07%), yang terutama disebabkan oleh minim atau tidak adanya akses mereka terhadap faktor-faktor produksi, termasuk tanah. Hal

ini terlihat dari jumlah petani gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar) yang mencapai 56,5% dari jumlah petani.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. tentang angka kemiskinan pada tahun 2009 dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2009

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
1	NAD	182,19	710,68	892,86	15,44	24,37	21,80
2	Sumatera Utara	688,04	811,64	1 499,68	11,45	11,56	11,51
3	Sumatera Barat	115,78	313,48	429,25	7,50	10,60	9,54
4	Sumatera Selatan	470,03	697,85	1 167,87	16,93	15,87	16,28
5	Bengkulu	117,60	206,53	324,13	19,16	18,28	18,59
6	Lampung	349,31	1 208,97	1 558,28	16,78	21,49	20,22
7	DKI Jakarta	323,17	-	323,17	3,62	-	3,62
8	Jawa Barat	2 531,37	2 452,20	4 983,57	10,33	14,28	11,96
9	Jawa Tengah	2 420,94	3 304,75	5 725,69	15,41	19,89	17,72
10	DI Yogyakarta	311,47	274,31	585,78	14,25	22,60	17,23
11	Jawa Timur	2 148,51	3 874,07	6 022,59	12,17	21,00	16,68
12	Kalimantan Barat	93,98	340,79	434,77	7,23	10,09	9,30
13	Kalimantan Tengah	35,78	130,08	165,85	4,45	8,34	7,02
14	Kalimantan selatan	68,76	107,21	175,98	4,82	5,33	5,12
15	Kalimantan Timur	77,06	162,16	239,22	4,00	13,86	7,73
16	Sulawesi Utara	79,25	140,31	219,57	8,14	11,05	9,79
17	Sulawesi Tengah	54,67	435,17	489,84	10,09	21,35	18,98
18	Sulawesi Selatan	124,50	839,06	963,57	4,94	15,81	12,31
19	Sulawesi Tenggara	26,19	408,15	434,34	4,96	23,11	18,93
20	Sulawesi Barat	43,51	114,72	158,23	12,59	16,65	15,29
	Indonesia	11 910,53	20 619,44	32 529,97	10,72	17,35	14,15

Sumber: BPS Jakarta, 2010

Berdasarkan Tabel 1 dapat menunjukkan bahwa secara nasional kemiskinan di Indonesia berada pada daerah pedesaan. Penduduk miskin yang ada di pedesaan menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 17,35% , berbeda jauh dengan keadaan kemiskinan yang berada di perkotaan yaitu 10,72%.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang mempunyai angka kemiskinan tinggi (dapat dilihat dari Tabel 1). Hal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun, karena kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan/kekurangan akan asset-aset penting seperti lahan dan factor-faktor produksi lainnya dan peluang-peluang dimana setiap manusia berhak memperolehnya.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Lampung pada bulan Maret 2009 sebesar 1.558,28 ribu (20,22%)
 Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 1.591,6 ribu (20,98%), berarti jumlah penduduk miskin menurun sebesar 33,3 ribu. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah di Provinsi Lampung, Maret 2008-Maret 2009.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin(Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2008	365,6	17,85
Maret 2009	349,31	16,78
<u>Pedesaan</u>		
Maret 2008	1.226,0	22,14
Maret 2009	1.208,97	21,49
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2008	1.591,6	20,98
Maret 2009	1.558,28	20,22

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas Panel Maret 2008 & Panel Maret 2009

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada bulan Maret 2008, sebagian besar (77,03%) penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, sementara pada bulan Maret 2009 persentase tersebut naik menjadi 77,58%.

Persentase angka kemiskinan di Provinsi Lampung akan di pengaruhi oleh adanya pendapatan terutama pada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang dapat menggambarkan taraf kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini penting untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk sampai tingkat kabupaten/kota. Data distribusi penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan golongan pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Lampung tahun 2008

Kabupaten/Kota	Golongan pengeluaran Per Kapita (Rp/kap)						Jumlah
	< 100.000	100.000-149.999	150.000-199.999	200.000-299.999	300.000-499.999	≥ 500.000	
Lampung Barat	1.31	13.74	6.70	29.15	36.85	12.25	100.00
Tanggamus	1.53	14.30	7.32	13.77	49.26	16.05	100.00
Lampung Selatan	1.50	12.31	10.91	33.78	23.42	18.08	100.00
Lampung Timur	0.54	8.53	13.96	16.12	42.61	18.24	100.00
Lampung Tengah	1.71	8.99	9.19	24.77	39.46	17.88	100.00
Lampung Utara	0.00	10.41	20.82	34.80	19.65	14.31	100.00
Way kana	2.95	17.35	2.04	43.27	27.96	6.44	100.00
Tulang Bawang	0.58	7.72	2.86	22.48	50.53	15.82	100.00
Bandar Lampung	0.00	1.46	4.87	10.19	20.29	63.18	100.00
Metro	2.21	8.58	5.13	13.27	35.44	35.37	100.00
Provinsi	1.11	9.75	9.02	23.62	34.73	21.77	100.00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2008

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa golongan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Lampung perbulan cukup tinggi terletak pada rentang Rp.300.000 sampai Rp. 499.999 dengan persentase sebesar 34,37%. Pola ini berlaku di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Metro. , sedangkan Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Way Kanan memiliki golongan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk sebulan cukup sedang yang terletak pada pengeluaran Rp. 200.000 sampai Rp. 299.999. Untuk Kota Bandar Lampung memiliki golongan

rata-rata pengeluaran per kapita sebulan cukup rendah pada kelompok pengeluaran di atas Rp.500.000.

Kabupaten Lampung Tengah dapat diperlihatkan pada Tabel 3 bahwa dapat dikatakan memiliki pendapatan yang merata dengan ditunjukkan adanya pemerataan jumlah pengeluaran, tetapi secara fakta yang ada Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya masih rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penguasaan lahan yang belum terlegalisasi dan merata oleh pemerintah.

Salah satu peningkatan pendapatan petani di Lampung Tengah dipengaruhi oleh luas penguasaan lahan karena lahan pertanian merupakan faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dan pendapatan petani. Pendapatan tersebut akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan petani.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani disesuaikan oleh pemerataan dan distribusi pendapatan.

Untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah pemerintah berupaya memajukan pembangunan pertanian kearah struktur penguasaan/pemilikan lahan melalui program reforma agraria. Program Reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam tingkat pendapatan melalui penguasaan/pemilikan lahan yang telah terlegalisasi.

Program reforma agraria merupakan suatu penyelenggaraan asset dan akses reform. Asset reform adalah proses retribusi lahan untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan lahan , sedangkan akses reform adalah proses penyediaan akses bagi masyarakat terhadap segala hal yang memungkinkan untuk lahannya sebagai sumber kehidupan (Joyo Winoto, 2007).

Program reforma agraria telah dijalankan di Kabupaten Lampung Tengah dan dapat dilihat dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan di daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan salah satu daerah pelaksanaan dari reforma agraria. Desa Sidorejo memiliki populasi sebanyak 383 KK berdasarkan strata penguasaan/luas garapan lahan pertanian yang dimiliki rumah tangga di Desa Sidorejo dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata luas tanah garapan lokasi reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah

No	Desa	Luas tanah Pertanian (Ha)	Petani Garapan (KK)	Rata-rata Kepemilikan (Ha/KK)	Keterangan
1	Sidorejo	116,96	383	0,3	Tegalan(jagung)
2	Sidodadi	113,18	462	0,2	Tegalan(jagung)
Jumlah		130,14	845	0,5	

Sumber: Hasil Inventarisasi BPN,2007

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Desa Sidorejo memiliki luas garapan lebih besar dibandingkan dengan Desa Sidodadi , walaupun terdapat petani garapan yang lebih banyak di Desa Sidodadi.

Desa Sidorejo memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas tetapi rata-rata kepemilikannya belum maksimal, oleh karena itu reforma agraria salah satunya dilakukan di Desa Sidorejo.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana gambaran penguasaan lahan setelah adanya reforma agraria di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana hubungan antara penguasaan lahan yang telah diikuti sertakan dalam reforma agraria terhadap tingkat pendapatan rumah tangga ?
4. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran penguasaan lahan setelah adanya reforma agraria di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mengetahui hubungan antara penguasaan lahan yang telah diikuti sertakan dalam reforma agraria terhadap tingkat pendapatan rumah tangga.

4. Mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Kegunaan penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi keilmuan, yaitu berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi pertanian khususnya tentang dampak reforma agraria terhadap tingkat pendapatan berdasarkan penguasaan lahan yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan pada semua petani.
2. Bagi pemerintah, berguna bagi informasi Pemerintah sebagai sarana evaluasi Program-program Reforma Agraria yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah lewat BPN di Provinsi Lampung (pada Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah) dan apa pengaruh perannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani.
3. Bagi petani Responden, informasi bagi petani dalam rangka pengadaan, pemanfaatan setifikasi lahan dan kaitan dengan Program Reforma Agraria yang sedang dijalankan dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
4. Bagi peneliti lain, sebagai sumber pustaka dan bahan pembanding pada waktu yang akan datang.